

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DALAM
MENUNJANG PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH.**

Stephani F Walangitan

ABSTRACT : *Walangitan , Stephani F , The effectiveness of tourism policies in supporting regional development of Toli Toli Regency in Central Sulawesi Province . Thesis of Faculty of Social and Political Sciences, Sam Ratulangi University. Supervisors by : (1) Drs.J.Mandey , M.Sc. (2) Drs.S.P.I. Rompas , M.Sc.*

The problem that face by most of local governments in Indonesia is the implementation of autonomous government without being overly dependent to the central government. It seems that this challenge of implementation is not simple to deal with by the local government. This condition is reflected in the high level of demand of GAF (General Allocation Fund) from most of the local government to the central government .

Relevant to the feature and characteristics of the problems examined, this research is used descriptive - analytical method (Nazir , 1988 ; Koentjaraningrat , 1997) . Descriptive methods can be interpreted as a process of solving problems examined by describing the current subject and object of the research based on the facts that appear or how is it appear (Nawawi , 2003) . To examine the effectiveness of tourism development policies in Toli - Toli . To analyze the policies contribution to the success of tourism development policy towards regional development, particularly in Toli – Toli region. For identifying and assessing the barriers faced by local governments of Toli - Toli in implementation of tourism development policy in this area.

Based on the results of data retrieval in that taking from the Department of Tourism in Tolitoli, Central Sulawesi, The existing data shown that there are 36 tourism objects in that area that consists of natural attractions, cultures, and history but only 2 tourism objects that managed by the government in this case, Department of Tourism and the rest remaining objects managed by the local community.

As a suggestion, It is better if the Department of Tourism can collaborate and working together with the local community in the development and management of tourism in Toli-Toli region, Central Sulawesi Province to increase the potential tourist attraction in order to increase local exchange and public welfare.

Keywords : *the development of tourist attraction , society welfare , local exchange.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Permasalahan yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia ialah melaksanakan pemerintahan yang otonom tanpa terlalu bergantung kepada pemerintah pusat.

Tampaknya tantangan ini bukanlah hal yang mudah untuk dihadapi oleh pemerintah daerah. Kondisi ini tercermin dari masih tingginya tingkat permintaan DAU (Dana Alokasi Umum) dari sebagian besar Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat. Padahal dalam

konteks pembiayaan pembangunan, DAU itu sendiri sesungguhnya merupakan *grant* (bantuan) dari pemerintah pusat kepada daerah, dengan asumsi bahwa daerah yang bersangkutan belum mampu untuk mengembangkan serta melaksanakan pembangunan daerahnya secara optimal. Namun pada sisi yang berbeda, pemerintah daerah berasumsi bahwa DAU merupakan hak yang harus diterima oleh mereka, serta merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh pemerintah pusat.

Pemahaman seperti inilah sebetulnya yang harus segera dikoreksi, sehingga pada gilirannya, desentralisasi tidak hanya merupakan pelimpahan kewenangan, tetapi yang lebih penting dari itu semua adalah kemampuan menggunakan kewenangan yang luas (*discreci*), untuk mendapatkan sumber pembiayaan pembangunan yang lebih berkualitas.

Dengan demikian, maka tantangan otonomi daerah dewasa ini adalah bagaimana daerah mampu untuk mencari dan menggali seluas-luasnya sumber-sumber ekonomi untuk dapat melaksanakan pembangunannya, serta yang paling pokok yaitu mensejahterakan masyarakatnya.

Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka sebenarnya, yang paling urgen

bagi pemerintah daerah adalah kemampuan untuk mengoptimalkan potensi internal yang dimilikinya serta mengatasi segenap kelemahan yang menjadi kendala bagi proses pembangunannya. Dengan demikian, dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi secara signifikan potensi-potensi apa saja yang dimiliki dan merupakan modal atau aset yang ada dan dapat dikembangkan, serta kelemahan-kelemahan apa yang dimiliki, sehingga menjadi prioritas untuk segera diberdayakan.

Sulawesi Tengah, khususnya Kabupaten Tolitoli misalnya, harus mampu mengembangkan beberapa potensi yang dimilikinya untuk kepentingan percepatan pembangunan lokal; atau paling tidak untuk mengembangkan potensi yang dimiliki daerah itu sendiri. Misalnya untuk pengembangan sektor pertanian, maka dilakukan pemberdayaan untuk para petani cengkih, kelapa atau pala. Program pemberdayaan itu sendiri tentunya dilakukan secara komprehensif, mulai dari kebutuhan akan bibit tanaman, penanaman, pemeliharaan, pendanaan, sampai pada penyediaan pasar. Namun demikian, sebetulnya Sulawesi Tengah, khususnya Kabupaten Tolitoli juga memiliki sumber daya lain yang amat

potensial untuk mendatangkan devisa, sekaligus dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan pendapatan per kapita penduduk, seperti misalnya terdapat kurang-lebih 36 lokasi obyek wisata yang sebagian telah dijadikan sebagai daerah tujuan wisata dalam bentuk objek wisata alam yang cukup menarik minat pengunjung, di antaranya kolam permandian Buntuna, pantai Lalos Kelondom, permandian alam Bendungan, permandian alam Pantai Pijar, Batu Bota, permandian alam Batu Kursi, permandian alam Batu Bangga, dan Pantai Kekot dan lain-lain. Selain itu ada sekitar 4 (empat) lokasi obyek wisata budaya.

Dari sekian banyak obyek wisata yang ada di Kabupaten Tolitoli, memang ada beberapa di antaranya yang telah dikembangkan untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah, namun ada juga yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi obyek wisata andalan bagi peningkatan penerimaan daerah, khususnya pendapatan asli daerah (PAD) guna membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah ini, namun sampai saat ini pengembangannya belum optimal dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli.

Untuk menjadikan obyek wisata alam maupun wisata budaya memiliki daya pikat yang tinggi bagi wisatawan, baik

wisatawan domestik (nusantara), terlebih lagi wisatawan manca negara, maka diperlukan upaya-upaya pengembangannya melalui kebijakan disektor ini yang benar-benar efektif.

Hasil pengamatan awal mengindikasikan bahwa kebijakan pengembangan pariwisata di daerah ini, dalam implemntasinya belum memperlihatkan hasil dan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pembangunan daerah. Hal ini disebabkan karena obyek wisata alam maupun wisata budaya belum optimal dikembangkan karena terkendalam pendanaan yang terbatas, sementara pemerintah daerah membutuhkan anggaran yang cukup untuk membiayai pembangunan infrastruktur daerah sebagai konsekuensi dari daerah yang relatif baru dimekakan.

Pada sisi yang lain, indikasi belum efektifnya kebijakan pengembangan pariwisata di daerah ini adalah belum memberi dampak signifikan bagi peningkatan pendapatan/penerimaan daerah, sehingga APBD Kabupaten Tolitoli masih bergantung pada bantuan pembiayaan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Indikasi lainnya adalah kebijakan pengembangan pariwisata belum mampu

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah ini.

Untuk itu, penelitian ini dipandang urgen untuk dilakukan dalam rangka menguji kebenaran dugaan di atas, sekaligus mengidentifikasi hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata di daerah ini.

METODE PENELITIAN

A. Metode Yang Digunakan

Relevan dengan sifat dan karakteristik permasalahan yang diteliti, maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis (Nazir, 1988; Koentjaraningrat, 1997). Metode deskriptif yang dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diteliti dengan melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya (Nawawi, 2003).

Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian yang non hipotesis sehingga dalam rangka penelitiannya bahkan tidak perlu merumuskan hipotesisnya (Arikunto, 1996). Metode penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan gambaran keseluruhan obyek penelitian secara akurat.

Pelaksanaan metode penelitian deskriptif tidak terbatas hanya sampai

pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut, selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti (Moleong, 2000).

Penggunaan metode deskriptif-analitis dimaksudkan untuk menggambarkan fenomena aktual dan faktual tentang sebuah gejala, keadaan atau variabel yang terangkum di dalamnya. Hal ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan kebijakan pengembangan pariwisata dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Tolitoli.

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka variabel-variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini terdiri dari : Efektivitas kebijakan pengembangan pariwisata dan keberhasilan pembangunan daerah. Variabel efektivitas kebijakan pengembangan pariwisata ditempatkan sebagai variabel bebas (independen variabel), sedangkan variabel keberhasilan pembangunan daerah ditempatkan sebagai variabel tak bebas (dependen variabel).

Adapun perumusan operasional untuk pengukuran masing-masing variabel, adalah sebagai berikut :

1. Efektivitas Kebijakan pengembangan pariwisata, dimaksudkan yaitu serangkaian tindakan-tindakan yang diambil/dipilih/ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Tolitoli dalam rangka mengembangkan potensi kepariwisataan yang ada sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang handal. Tindakan-tindakan tersebut dapat berupa : penetapan peraturan-peraturan yang relevan dengan usaha/kegiatan kepariwisataan; penetapan program-program kepariwisataan untuk dapat dilaksanakan, baik menyangkut pengembangan obyek wisata, industri pariwisata, pemasaran dan promosi, penyediaan prasarana pendukung, dan sebagainya.
2. Keberhasilan pembangunan daerah, dimaksudkan ialah perbaikan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, dilihat dari peningkatan pendapatan masyarakat, pendidikan dan kesehatan; perbaikan sarana dan prasarana transportasi, kebutuhan air bersih, sanitasi dan lain-lain; peningkatan partisipasi masyarakat

dalam pembangunan dan peningkatan kemandirian dalam usaha ekonomi masyarakat.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden atau informan (sumber data) yang terkait, sedangkan untuk data sekunder diperoleh melalui data yang telah diteliti ataupun dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam rangka memperoleh data primer maupun sekunder, sebagai berikut : Wawancara, Dokumentasi, Observasi

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis model interaktif (*interactive analysis*) yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2009) yang terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu : Reduksi data (*data reduction*), Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*),

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Kebijakan Pengembangan Pariwisata

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa konsepsi kebijakan pengembangan pariwisata yang dioperasionalkan dalam penelitian ini ialah kebijakan yang diambil dan diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tolitoli.

Variabel implementasi kebijakan pengembangan pariwisata dimaksudkan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tolitoli dalam upaya pengembangan potensi-potensi pariwisata di Kabupaten Tolitoli sehingga menjadi salah satu sektor andalan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam kaitannya dengan efektivitas kebijakan pengembangan potensi pariwisata dalam penelitian ini, variabel yang diteliti dikaitkan dengan komponen-komponen kebijakan yang relevan. Komponen-komponen yang relevan dengan tindakan-tindakan (kebijakan) yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tolitoli ialah mencakup komponen-komponen : Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur pelaksana

kebijakan; peningkatan kualitas pelayanan, terutama pelayanan perizinan usaha/industri kepariwisataan; peningkatan pemasaran dan promosi wisata; Sosialisasi dan penyuluhan sadar wisata; pemanfaatan teknologi informasi; dan pembenahan manajemen kepariwisataan.

1. Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur pelaksana kebijakan

Sumber daya aparatur dalam sebuah instansi memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Dalam hubungan ini, hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tolitoli menyatakan bahwa “peningkatan sumber daya aparatur dilingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Tolitoli, baik dari sisi jumlah (kecukupan) maupun mutu (kualitas) selalu kami upayakan seiring dengan dinamika kompleksitas tugas dan fungsi dinas” (Hasil Wawancara, Senin, 31 Maret 2014).

Perlu ditekankan bahwa, disamping tingkat kecukupan aparatur (pegawai) berdasarkan perbagian tugas dan fungsi yang tersedia, namun yang tidak kalah pentingnya adalah kualitas dan profesionalisme aparatur Dinas yang

dapat diandalkan dalam mengelola tugas-tugas pokok dan fungsi yang dewasa ini semakin dinamis dan kompleks. Oleh karena itu, penempatan pegawai dalam posisi jabatan harus sesuai dengan kompetensinya sehingga melahirkan sosok aparatur yang professional dalam menjalankan tugasnya dibidang kepariwisataan.

2. Peningkatan Kualits Pelayanan

Guna menarik wisatawan sebanyak mungkin untuk berkunjung ke berbagai obyek wisata di kabupaten Tolitoli, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara, maka Pemerintah daerah, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tolitoli serta stakeholders terkait dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

3. Sosialisasi dan penyuluhan sadar wisata

Sosialisasi dan penyuluhan sadar wisata merupakan kebijakan/ program yang perlu dilakukan secara kontinu atau berkesinmbungan, seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat disekitar obyek wisata. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan, baik lingkungan alam sebagai tempat tujuan wisata maupun lingkungan social di mana wisatawan

akan berinteraksi dengan masyarakat sekitar.

Untuk menarik wisatawan datang berkunjung ke daerah ini, pemerintah Kabupaten Tolitoli, bekerjasama dengan pihak-pihak terkait melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat program pariwisata.

4. Pembinaan manajemen kepariwisataan

Dalam mensukseskan program pengembangan pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tolitoli bersama stakeholders lainnya berupaya melakukan pembinaan manajemen kepariwisataan di instansi masing-masing.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan pariwisata dilihat dari aspek pembinaan manajemen kepariwisataan, dapat dikatakan cukup efektif. Mengacu pada keseluruhan elemen kebijakan/program yang mendukung pencapaian efektivitas kebijakan pengembangan pariwisata di kabupaten Tolitoli berdasarkan hasil wawancara, maka dapat disimpulkan sementara bahwa hampir semua elemen kebijakan tersebut mendukung pencapaian efektivitas kebijakan pengembangan pariwisata, kecuali aspek kapasitas sumberdaya aparatur.

B. Kontribusi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Terhadap Keberhasilan Pembangunan Daerah

Keberhasilan pembangunan daerah turut ditentukan oleh banyak faktor, dan salah satu faktor penting adalah keuangan daerah yang tercermin di dalam APBD, sementara PAD (pendapatan asli daerah) merupakan salah satu komponen keuangan daerah yang menunjukkan kemampuan otonomi daerah itu sendiri.

Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Tolitoli, bahwa besar penerima disektor pariwisata pada tahun 2013 sebesar Rp. 59775000, sementara besar APBD untuk tahun yang sama sekitar Rp.669272423.2. Dengan demikian, kontribusi Penerimaan sektor pariwisata terhadap penerimaan APBD Kabupaten Kepulauan Tolitoli diperoleh sebesar 8,93 %. Hal ini bermakna bahwa keberhasilan pembangunan daerah turut dikontribusi oleh kebijakan pengembangan pariwisata sebesar 8,93 %.

Dilihat besarnya kontribusi kebijakan pengembangan pariwisata terhadap keberhasilan pembangunan daerah yang cukup signifikan, maka hal ini mengindikasikan bahwa pengembangan pariwisata dan prospeknya kedepan cukup menjanjikan

dalam turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tolitoli.

C. Hambatan Dalam Pencapaian Efektivitas Kebijakan Pengembangan Pariwisata

Sejalan dengan itu berbagai langkah kebijakan yang ditempuh dalam perkembangan kepariwisataan daerah, baik yang sifatnya pembinaan/ penyuluhan, menggali dan mengembangkan potensi wisata yang ada menjadi sumber PAD, serta penataan dan peningkatan sarana dan prasarana walaupun belum mencapai target yang diharapkan.

Melalui langkah dan upaya tersebut telah mampu mendinamisasikan perkembangan sektor pariwisata antara lain tercermin dari pertambahan wisatawan, baik mancanegara maupun nusantara yang berkunjung ke Kabupaten Tolitoli dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang walaupun berfluktuasi tetapi mampu menggairahkan sektor pariwisata daerah.

Dalam teori kebijakan, sebagaimana telah dikemukakan pada bagian Tinjauan Pustaka bahwa suatu kebijakan tidak dapat mencapai tujuan/sasaran (hasil atau dampak) yang diharapkan, dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain seperti yang dikemukakan oleh Anderson (1972), antara lain karena : tersedianya sumber-sumber

yang terbatas, kesalahan dalam mengadministrasikan kebijakan-kebijakan, masyarakat memberi respon atau melaksanakan kebijakan dengan cara-caranya sendiri, kebijakan yang mempunyai tujuan yang bertentangan satu sama lain, biaya yang besar dari masalahnya sendiri, terjadinya perubahan sifat permasalahan ketika kebijakan sedang dilaksanakan, adanya masalah-masalah baru yang lebih menarik atau mengalihkan perhatian dari masalah-masalah yang telah ada, dan lain sebagainya.

Dengan mengacu pada teori tersebut, maka dari survei yang dilakukan mengenai hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Tolitoli diperoleh gambaran tentang beberapa faktor internal dan eksternal yang menghambat pencapaian efektivitas kebijakan pengembangan pariwisata Kabupaten Tolitoli, antara lain:

1. Sarana dan prasarana yang belum memadai

Fasilitas yang tersedia, baik di Kantor Dinas maupun untuk petugas operasional dilapangan masih kurang. Hal ini merupakan salah satu faktor yang turut menyebabkan belum efektifnya pelaksanaan tugas-tugas aparat Dinas. Kondisi ini ditekankan oleh Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tolitoli, bahwa :

Hasil wawancara mengindikasikan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai merupakan factor penghambat pencapaian efektivitas kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Tolitoli.

2. Pengelolaan potensi dan objek wisata yang belum optimal

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan produk Wisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tolitoli menegaskan bahwa “keragaman dan mutu produk wisata, terutama produk-produk untuk cendramata yang bernilai seni dan nilai budaya lokal terus dikembangkan, namun sering terkendala oleh keterbatasan modal usaha para pengrajin (pelaku usaha), sehingga pemerintah berupaya untuk memberikan bantuan melalui skrim kredit usaha rakyat (KUR) tanpa agunan. Hal ini dimaksudkan agar para pelaku usaha souvenir memiliki kemampuan untuk mengembangkan beragam jenis dan mutu yang terstandarisasi” (Selasa, 1 April 2014).

Adapun Potensi obyek wisata di Kabupaten Tolitoli terdiri dari obyek wisata alam sebanyak 18 buah, dan yang

dikelola oleh Pemerintah Daerah (Dinas) hanya sebanyak 2 buah obyek wisata yang dikelola oleh Dinas, sementara sisanya sebanyak 16 buah dikelola oleh masyarakat dan pihak swasta. Kedua obyek wisata tersebut adalah Pulau Lutungan dan Sabang Tende. Ke dua obyek wisata tersebut merupakan obyek wisata favorit yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Sementara itu, obyek wisata budaya dan sejarah sebanyak 20 buah.

3. Terbatasnya anggaran promosi wisata

Dana atau anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk sektor pariwisata masih sangat kecil atau kurang memadai, baik untuk kegiatan operasional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata maupun untuk pengembangan dan pemeliharaan obyek-obyek wisata yang telah ada, dan dana untuk promosi kepariwisataan daerah. Hal ini tercermin dari alokasi anggaran yang digunakan dalam melaksanakan Rencana Kegiatan dalam Tahun Anggaran 2013 bersumber dari APBD sebesar Rp. 5.646.113.500

Dengan anggaran hanya sebesar 4,59 % dari total anggaran Dinas yang dialokasikan untuk kegiatan promosi pariwisata, maka agak sulit untuk diharapkan meningkatnya jumlah

kunjungan wisatawan ke daerah ini. Hal ini tercermin dari jumlah kunjungan wisatawan manca negara dalam tahun 2014 selang bulan Januari sampai dengan bulan November hanya sebanyak 48 orang. Jumlah ini jauh lebih kecil dibanding dengan daerah kunjungan wisata lainnya pulau Sulawesi.

4. Kurangnya jiwa sadar wisata dan SDM yang profesional dalam pengelolaan dan pelayanan

Sadar wisata yang rendah ini masih terlihat baik dikalangan pelaku usaha maupun karyawan pada usaha/industri pariwisata, maupun pada masyarakat umumnya terutama yang ada disekitar obyek-obyek wisata.

Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia juga masih nampak baik pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu sendiri, maupun pada unsur-unsur pelaksana usaha pariwisata dan pengelola obyek wisata. Jumlah aparat pelaksana pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tolitoli masih kecil dibanding dengan luasnya daerah operasional dari instansi ini. Kualitas sumber daya manusia pengelola usaha kepariwisataan seperti di hotel-hotel, restoran/rumah makan, pengelola obyek-obyek wisata, juga masih belum memadai, sehingga dianggap kurang profesional.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya, hampir semua elemen kebijakan dapat mendukung pencapaian efektivitas kebijakan pengembangan pariwisata Kabupaten Tolitoli, kecuali aspek kapasitas sumberdaya aparatur yang belum memadai.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Tolitoli turut ditentukan atau dikontribusi oleh faktor kebijakan pengembangan pariwisata di daerah tersebut.
3. Terdapat empat faktor yang menjadi hambatan dalam pencapaian efektivitas kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Tolitoli, yaitu : Sarana dan prasarana yang belum memadai, pengelolaan potensi dan objek wisata yang belum optimal, terbatasnya anggaran promosi wisata, Kurangnya jiwa sadar wisata dan SDM yang profesional dalam pengelolaan dan pelayanan.

B. Saran-Saran

Mengacu pada beberapa temua sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diberikan beberapa saran, sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya paratur, terutama dari sisi kompetensi, maka pemerintah daerah, khususnya Dinas Kebudayaan dan pariwisata perlu mengikut sertakan pegawai yang berpendidikan SLTA dalam studi lanjut pada tingkat D1-3, terutama pada bidang tugas yang relevan.
2. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pengembangan pariwisata, maka diharapkan agar pemerintah menaikkan proporsi alokasi anggaran kepariwisataan, khususnya untuk pengadaan sarana dan prasarana serta kegiatan operasional pemasaran dan prmosi wisata.
3. Untuk meningkatkan jiwa dan perlaku sadar wisata, khususnya bagi masyarakat pariwisata, maka pemerintah bekerjasama dengan stakeholders lainnya untuk mengadakan sosialisasi dan penyuluhan secara kontinu dengan melibatkan pula tokoh-tokoh agama dan adat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulwahab, S, 1992, *Manajemen Kepariwisata*, PT Paradnya Paramita, Jakarta.
- , 2001. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Edisi ke-dua, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- , 1997, *Analisis Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara
- Anderson, J.E., 1972, *Cases in Public Policy Making*, New York Preager Publishers.
- Anonimous, 1989, Surat Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.5/UM/209/MPPT/1989.
- Beratha Nyoman, I. 1982, *Desa, Masyarakat Desa Dan Pembangunan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Bryant Coralie dan White Louise, 1987, *Manajemen Pembangunan untuk Negara-Negara Berkembang* (terjemahan), Jakarta : LP3ES.
- Dunn, W.N., 1999, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- , 1988, *Analisis Kebijakan Publik*, terjemahan, Hanindita Graha Widya, Yogyakarta.
- Direktorat Wisata Alam dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan, 2004, Tentang Pengembangan Produk Wisata Alam, Dirjen Pariwisata, Jakarta.-
- Dwiyanto, A., 1999, *Evaluasi Program dan Kebijakan Pemerintah* (Makalah pada Pelatihan Teknik dan Manajemen Kebijaksanaan Publik University Gadjah Mada Angkatan II) MAP-UGM, Jakarta.
- Dye, Th.R., 1992, *Understanding Public Policy (Seventh Edition)*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 07632.
- Effendi, S., 2001, *Studi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Henry, N., 1995, *Administrasi Negara dan Masalah-Masalah Publik*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Islamy, M.I., 1996, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Jones, Ch. O.,1996, *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Katz, Saul. M., 1987, *Modernisasi Administrasi Untuk Pembangunan Nasional*, (terjemahan), Bina Aksara, Jakarta.
- Keban, Y.T., 1999, *Pengantar Administrasi Publik*, Modul Matrikulasi,MAP-UGM, Yogyakarta.

- Koentjaraningrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, P.T. Gramedia, Jakarta.
- Marpaung, H., 2002, *Pengetahuan Kepariwisata*, Alfabeta, Bandung.-
- Moleong, L..J, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Naisbitt, J., 1994, *Global Paradox*, Jakarta.
- Nawawi, H., 2003, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cetakan ke-10, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Nazir, M, 1988. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ghalia, Jakarta.
- Siagian, SP, 1985, *Administrasi Pembangunan*, Cetakan Kesebelas, Jakarta : Gunung Agung.
- Spillane, J. J. 1991, *Ekonomi Pariwisata*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Suwantoro, G., 1997, *Dasar-Dasar Pariwisata*, Andi, Yogyakarta.-
- Tjokroamidjojo, H. Bintoro Dan Mustopadidjaya, A.R, 1996, *Teori dan Strategi Pembangunan Nasioal*, Cetakan Kedua, Jakarta : Gunung Agung.
- Tjokroamidjojo, Bintoro,, 1987, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta
- Tjokrowinoto Moeljarto, 1987, *Politik Pembangunan : Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*, Yogyakarta : Tiara Press.
- Todaro, Michael, 1984, *Ilmu Ekonomi Bagi Negara Sedang berkembang*, Akademik Persindo, Jakarta.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Keperawisataan
- Wibawa, S, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Winarno, B., 1989, *Teori Kebijaksanaan Publik*, Pusat Antar Universitas - Studi Sosial UGM, Yogyakarta.
- Yoeti, H.O.A., 1990, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Penerbit Angkasa, Bandung.
- , 1994, *Pemasaran Pariwisata Terpadu*, Penerbit Angkasa, Bandung